

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adi, R., 2012, *Sosiologi hukum: kajian hukum secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fathor Rasyid, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. IAIN Kediri Press. Kediri.
- Hamzah Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- I Gde Pantja, Rusdin, Agus Widjajanto, 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nursya, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. CV Alungadan Mandiri.
- Shanti Dwi, Suryani Lidya, 2015, *Korupsi Dan KPK Dalam Prespektif Hukum, Ekonomi, Dan Sosial*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. Jakarta Pusat.
- Subekti, R., 1997, *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, CV. Bandung.
- Suyanto. H, 2018, *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara. Sidoarjo.

Syafrida Hafni, 2022, *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.  
Jogjakarta.

Ucuk Yoyok, 2019, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal Di KUHP*.  
Unitomo Pers. Surabaya

Utari, Ahmad, Aditya, 2024, *Metodologi Penelitian*. CV Gita Lentera. Padang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (Lembaran Negara arepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6842)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. No.3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 131)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956

*Reglement Buitengeweten* (RBg)

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

### C. JURNAL

Fransiska Adelina, “*Bentuk-bentuk Korupsi Politik*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.1, 2019.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/256>

Guntur Rambey, “*Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016.

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/785>

Hapsah Siti. “*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, 2016. DOI:

<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n3.a10>

Hartanto Heri dan Rizki Lukman M. “*Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri*”, Jurnal Verstek, Vol. 8, No.2, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44099>

Hermayenti Felia. “*Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Untuk Menyelamatkan Kepentingan Masyarakat dalam Prespektif Teori*

*Utilitarianisme*”, Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Vol. 3, No. 1. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v3i1.75020>

Hilal Arya, Yusrizal, dan Fauzah, “*Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 2, 2021. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/10612/5480>

Isfardiyana Siti Hapsah, “*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*”, PJIH Volume 3, Nomor 3, 2016,

DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10>.

Karunia Ana Aniza, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Teori Lawrance M. Friedman*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, 2022.

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831>

Kenneth Nathanael. “*Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*”, *Journal Education and Business*, Vol. 2, No. 1. 2024.

DOI: <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>

Lumban Selamat, “*Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor. 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt. Tim)*”, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.2173>

Nashriana dan Umi Rozah, “*Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 5, No. 3, 2023.

DOI: <https://10.14710/jphi.v5i3.411-432>

Nola Luthvi Febryka, “*Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankrupcy*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047>

Prayoga Teddy, Basri, Jhony, “*Analisis Putusan Pidana Dalam Kasus Korupsi Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Asas Keadilan*”, Jatijajar Law Review, Vol. 1, No. 2. 2022.

<https://ejournal.unimugo.ac.id>

Priangga Rizal widia, “*Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*”, Privat Law, Vol. V, No. 1 2017.

DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372>.

Phirari, dkk, “*Analisis Pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata*”, Jurnal litigasi Amsir, Vol. 10 No. 1, 2022. <https://journalstih.amsir.ac.id>

Sadam Syarif, dkk, “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, Issue. 2, 2022.

DOI: <https://dx.doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

Sari Emnovita, “*Analisis hukum keabsahan sita eksekusi oleh Pengadilan terhadap objek eksekusi yang beralih kepada pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/Pdt.Bth/2017/Pn Mdn)*”,

Indonesia of Journal Business Law, Vol. 1, No. 2, 2022. DOI:  
<https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1876>.

Sri, Setiani, dan Iffah, “*Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*”, Jurnal Civics, Vol. 14, No. 2, 2017. DOI:  
<https://doi.or/10.21831/civics.v14i2.16852>

Suciati, “*Konsep Surat Bukti (Novum) Sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata dalam Prespektif Keadilan*”, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 2. 2021. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id>

Suryanto Ahmad Fahd Budi, “*Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia*”, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1, No. 2, 2021.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasisya>

Syahri Buamona, “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi*”, Jurnal Kajian Hukum dan ekonomi Vol. 8, No. 2, 2022.

DOI: <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i02.88>

Mangun Ulang. “*Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20, No. 4. 2020.

DOI: <https://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>

Wati Mesrah, Juni, dkk, “*Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”,  
Jurnal IKAMAKUM, Vol. 2, No. 2. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766>

Wibisono, Dian, dan Muhammad, “*Analisis Putusan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia*” Jurnal Kertha Semaya Vol. 10,  
No. 7, 2022.

DOI: <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p15>.

#### **D. LAIN-LAIN**

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus Nomor:  
128/Pid.Sus-TPK/2023/PNSBY

Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 291/PK/Pdt/2011